

## PERAN PSIKOLOGI KEBIJAKAN DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL DI SEKTOR NIRMILITER

Adi Putra Wibisono<sup>1\*</sup>, Kasih Prihantoro<sup>2</sup>, Jati Bambang Priyambodo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding e-mail: [adiputraawibisono@gmail.com](mailto:adiputraawibisono@gmail.com)

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v5i6.1076](https://doi.org/10.53866/jimi.v5i6.1076)

### Abstrak

Artikel ini menganalisis peran psikologi kebijakan dalam memperkuat ketahanan nasional di sektor nirmiliter dengan menekankan pentingnya integrasi mekanisme psikologis dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Melalui pendekatan kualitatif berbasis *systematic literature review*, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti persepsi risiko, bias kognitif, kohesi sosial, collective efficacy, serta tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan di bidang sosial budaya, ekonomi, kesehatan, siber, pangan, dan lingkungan. Temuan penelitian menegaskan bahwa penggunaan *behavioral insights* dan *behavioral governance* dapat meningkatkan kepatuhan publik, mengurangi resistensi terhadap kebijakan strategis, dan memperkuat legitimasi institusional. Selain itu, tantangan implementasi seperti keterbatasan unit perilaku pemerintah, kurangnya data empiris, hambatan budaya-birokrasi, serta isu etika dalam penggunaan *nudge* menunjukkan perlunya strategi nasional yang lebih sistematis. Artikel ini merekomendasikan pembentukan *Behavioral Insights* unit nasional, penguatan riset perilaku, serta integrasi psikologi kebijakan dalam Rencana Aksi Nasional untuk membangun ketahanan nirmiliter Indonesia yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Psikologi Kebijakan, Ketahanan Nirmiliter, *Behavioral Insights*, Persepsi Publik, Kohesi Sosial, *Behavioral Governance*, Kepercayaan Publik, Komunikasi Risiko.

### *The Role Of Policy Psychology In Strengthening National Resilience In The Non-Military Sector*

#### Abstract

*This article analyzes the role of policy psychology in strengthening national resilience in the non-military sector by emphasizing the importance of integrating psychological mechanisms in the formulation and implementation of public policy. Through a qualitative approach based on a systematic literature review, this study shows that factors such as risk perception, cognitive bias, social cohesion, collective efficacy, and the level of public trust in the government have a significant effect on the effectiveness of policies in the socio-cultural, economic, health, cyber, food, and environmental fields. The findings confirm that the use of behavioral insights and behavioral governance can increase public compliance, reduce resistance to strategic policies, and strengthen institutional legitimacy. In addition, implementation challenges such as the limitations of government behavioral units, lack of empirical data, cultural-bureaucratic barriers, and ethical issues in the use of nudges indicate the need for a more systematic national strategy. This article recommends the establishment of a national Behavioral Insights Unit, the strengthening of behavioral research, and the integration of policy psychology into the National Action Plan to build a more adaptive and sustainable non-military resilience in Indonesia.*

**Keywords:** Policy Psychology, Non-Military Resilience, Behavioral Insights, Public Perception, Social Cohesion, Behavioral Governance, Public Trust, Risk Communication.

## 1. Pendahuluan

Ketahanan nasional pada sektor nirmiliter semakin diakui sebagai fondasi utama stabilitas negara di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Dimensi ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, teknologi, pangan, dan lingkungan merupakan elemen yang saling terkait dan menentukan tingkat kerentanan maupun kemampuan adaptasi suatu bangsa. Krisis multidimensional seperti pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan dan respons sosial masyarakat berperan langsung terhadap keberlanjutan fungsi negara, termasuk stabilitas ekonomi dan tata kelola publik (Haldane et al., 2021). Di saat yang sama, ancaman non-tradisional seperti polarisasi sosial, degradasi lingkungan, dan disrupsi teknologi memperlihatkan bahwa ketahanan nasional bukan lagi sekadar persoalan militeristik, melainkan bergeser pada kemampuan kolektif masyarakat dalam menghadapi gangguan yang bersifat lintas-sektor. Literatur kontemporer menegaskan bahwa negara yang mampu membangun resiliensi nirmiliter cenderung lebih siap menghadapi guncangan global dan lebih cepat pulih dari krisis (Fjäder, 2014).

Meningkatnya ketergantungan pada sistem digital dan rantai pasok global memperluas spektrum ancaman yang harus dikelola negara. Keamanan siber dan ketahanan informasi kini menjadi faktor penentu stabilitas sosial, mengingat serangan siber dan disinformasi dapat mempengaruhi perilaku publik serta legitimasi kebijakan pemerintah (Tzavara, 2023). Pada sektor pangan dan lingkungan, ketahanan sistem produksi serta mitigasi risiko iklim merupakan indikator krusial untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pendekatan food-systems resilience semakin diadopsi dalam perumusan kebijakan publik (Roosevelt et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, upaya memperkuat ketahanan nasional nirmiliter membutuhkan tata kelola adaptif yang menempatkan faktor sosial-budaya sebagai modal strategis bangsa, termasuk nilai gotong royong, kohesi sosial, dan ketahanan komunitas lokal (Putra et al., 2024). Dengan demikian, urgensi penguatan ketahanan nirmiliter tidak hanya terletak pada perlindungan terhadap ancaman, tetapi juga pada pembangunan kapasitas masyarakat yang memungkinkan negara menghadapi transformasi global secara berkelanjutan.

Tantangan kontemporer yang dihadapi negara tidak lagi terbatas pada ancaman militer, melainkan semakin didominasi oleh ancaman non-tradisional yang bersifat multidimensional. Disinformasi, misalnya, telah menjadi instrumen strategis yang dapat mengganggu stabilitas politik dan memicu polarisasi sosial. Menurut Wardle dan Derakhshan (2017), disinformasi bekerja melalui manipulasi konten dan penyebaran narasi palsu yang menarget persepsi publik serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dampak lain muncul dalam bentuk krisis sosial yang berkaitan dengan ketidaksetaraan, ketegangan identitas, dan erosi kepercayaan sosial, yang menurut Putnam (2007) dapat melemahkan kohesi sosial dan menghambat kemampuan kolektif suatu bangsa untuk menghadapi krisis. Dengan demikian, kompleksitas ancaman ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial dan psikologis masyarakat merupakan bagian integral dari ketahanan nasional secara keseluruhan.

Selain disinformasi dan krisis sosial, ancaman non-tradisional seperti pandemi, perubahan iklim, dan instabilitas ekonomi global turut memperburuk kerentanan psikologis publik. Penelitian Bonanno et al. (2010) menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap peristiwa krisis dapat menurunkan kapasitas resiliensi psikologis individu, sehingga meningkatkan kecemasan kolektif dan risiko perilaku maladaptif dalam masyarakat. Kerentanan psikologis ini diperburuk oleh ekosistem media digital yang mempercepat penyebaran informasi berlebih (*information overload*), yang menurut Bawden dan Robinson (2009) dapat menurunkan kemampuan publik dalam membuat keputusan rasional. Ancaman yang bersifat simultan ini menegaskan bahwa negara membutuhkan kebijakan yang tidak hanya responsif secara struktural, tetapi juga mempertimbangkan dinamika psikologis masyarakat sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional di era modern.

Salah satu kesenjangan utama dalam proses perumusan kebijakan publik adalah kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa masyarakat akan merespons kebijakan secara rasional dan linier, padahal penelitian psikologis menunjukkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh bias kognitif, heuristik, dan dinamika emosional. Kahneman (2011) menegaskan bahwa individu umumnya menggunakan “pemikiran cepat” (System 1) yang intuitif dan emosional, sehingga sering membuat keputusan yang tidak sepenuhnya rasional ketika berhadapan dengan informasi kebijakan. Namun, banyak kebijakan masih didesain dengan model homo economicus yang mengabaikan faktor-faktor psikologis tersebut, sehingga implementasi sering tidak mencapai target perilaku publik yang diharapkan. Jones (1999) juga menunjukkan bahwa keterbatasan kognitif (*bounded rationality*) berpengaruh besar terhadap bagaimana masyarakat memproses informasi

kebijakan, tetapi aspek ini jarang menjadi pertimbangan utama dalam desain kebijakan tradisional.

Pengabaian terhadap dimensi psikologis juga tampak dalam rendahnya integrasi behavioral insights dalam institusi pemerintahan, padahal pendekatan tersebut terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan. Thaler dan Sunstein (2008) menunjukkan bahwa intervensi berbasis nudges dapat mendorong perubahan perilaku yang signifikan tanpa paksaan, sehingga relevan diterapkan pada isu-isu publik seperti kesehatan, edukasi, hingga ketahanan sosial. Meski demikian, banyak pembuat kebijakan masih memfokuskan pendekatan mereka pada instrumen regulatif dan struktural, bukan pada faktor psikologis yang menentukan respons publik terhadap kebijakan. Shafir (2013) menekankan bahwa dimensi psikologi publik sangat penting, terutama dalam konteks kelompok rentan yang menghadapi tekanan sosial-ekonomi, karena kondisi psikologis mereka membentuk cara mereka memproses kebijakan dan mengambil keputusan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya paradigma kebijakan yang lebih komprehensif, yaitu kebijakan yang tidak hanya berbasis bukti (*evidence-based policy*), tetapi juga berbasis perilaku manusia (*behavior-based policy*).

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana pendekatan psikologi kebijakan dapat berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat ketahanan nasional di sektor nirmiliter yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, teknologi, pangan, dan lingkungan. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi mekanisme psikologis yang memengaruhi respons, persepsi, serta kepatuhan publik terhadap kebijakan nasional, sekaligus menjelaskan bagaimana pemahaman mengenai bias kognitif, perilaku kolektif, dan dinamika psikologis masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman non-tradisional. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memetakan kesenjangan dalam kebijakan saat ini yang masih mengabaikan aspek psikologis, serta menawarkan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan *behavioral insights* dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis peran psikologi kebijakan dalam memperkuat ketahanan nasional pada berbagai sektor nirmiliter, meliputi dimensi sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, teknologi, pangan, dan lingkungan. Kajian difokuskan pada bagaimana mekanisme psikologis seperti persepsi risiko, bias kognitif, kepercayaan institusional, dinamika kelompok, dan respons emosional masyarakat mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman non-tradisional. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperluas perspektif ketahanan nasional nirmiliter melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan psikologi, kebijakan publik, dan studi keamanan. Dengan menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor perilaku yang menentukan keberhasilan kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar konseptual dan praktis bagi pemerintah dalam merancang strategi ketahanan nasional yang lebih adaptif, berbasis manusia, dan mampu menjawab tantangan kontemporer secara efektif.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Psikologi Kebijakan

#### 2.1.1. Definisi dan Ruang Lingkup Kebijakan

Psikologi kebijakan (*behavioral public policy*) didefinisikan sebagai pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi, ekonomi perilaku, dan ilmu kebijakan untuk memahami bagaimana individu memproses informasi dan merespons intervensi pemerintah. Menurut Oliver (2017), psikologi kebijakan berangkat dari premis bahwa perilaku publik tidak semata-mata ditentukan oleh rasionalitas penuh, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor kognitif, emosional, dan sosial. Premis ini selaras dengan temuan Kahneman (2011) yang menjelaskan bahwa manusia berpikir menggunakan dua system intuitif dan analitis yang membuka ruang bagi berbagai *cognitive biases* dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, psikologi kebijakan berfungsi sebagai kerangka teoritis untuk menjelaskan bagaimana perilaku masyarakat dapat diarahkan melalui desain kebijakan yang mempertimbangkan mekanisme psikologis nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ruang lingkup psikologi kebijakan mencakup berbagai aspek seperti *nudging*, pengaruh norma sosial, persepsi risiko, kepercayaan terhadap institusi, hingga desain arsitektur pilihan. Thaler dan Sunstein (2008) menunjukkan bahwa *nudges* bekerja dengan memanfaatkan kecenderungan manusia untuk mengandalkan heuristik dalam pengambilan keputusan, sehingga intervensi dapat meningkatkan kepatuhan publik tanpa menggunakan instrumen koersif. Selain itu, psikologi sosial turut memperluas ruang lingkup ini melalui kajian mengenai bagaimana legitimasi institusi dan rasa keadilan prosedural memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan publik (Tyler, 2006). Ruang lingkup yang luas ini menjadikan psikologi

kebijakan relevan dalam berbagai sektor nirmiliter mulai dari kesehatan, ketahanan informasi, hingga keamanan sosial karena pendekatan ini mampu menjelaskan dan memodifikasi perilaku kolektif dalam menghadapi ancaman kontemporer.

### 2.1.2 Model Pengambilan Keputusan

Konsep *bounded rationality* diperkenalkan oleh Herbert Simon untuk menggambarkan bahwa individu tidak selalu mampu membuat keputusan secara sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi, waktu, serta kapasitas kognitif (Simon, 1955). Menurut Simon (1990), manusia cenderung menggunakan strategi *satisficing* memilih opsi yang cukup memuaskan, bukan yang optimal sebagai respons terhadap kompleksitas lingkungan. Model ini sangat relevan dalam konteks kebijakan publik, di mana masyarakat seringkali harus menilai risiko atau informasi kebijakan dalam kondisi ketidakpastian. Kahneman (2011) memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa sistem berpikir intuitif menyebabkan individu mengandalkan proses cepat yang memudahkan terjadinya kesalahan penilaian dan penyederhanaan berlebihan.

Sementara itu, *bias kognitif* dan *framing effects* turut memengaruhi bagaimana individu menginterpretasikan informasi kebijakan. Penelitian Tversky dan Kahneman (1974) menunjukkan bahwa bias seperti availability heuristic dan anchoring dapat mendistorsi persepsi risiko masyarakat, sehingga memengaruhi kepatuhan terhadap kebijakan. Lebih lanjut, *framing effects* menjelaskan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan sangat bergantung pada bagaimana informasi tersebut disajikan. Tversky dan Kahneman (1981) menemukan bahwa individu membuat keputusan berbeda ketika sebuah isu dipresentasikan sebagai “kehilangan” dibandingkan “keuntungan”, meskipun substansinya sama. Dalam konteks ketahanan nasional nirmiliter, pemahaman mengenai framing menjadi penting karena penyajian kebijakan public seperti kampanye kesehatan, mitigasi disinformasi, atau kebijakan keamanan social dapat menentukan tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat.

### 2.1.3 Psikologi Komunikasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan yang efektif sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip psikologi sosial, terutama terkait persuasi dan mekanisme perubahan sikap. Cialdini (2007) menjelaskan bahwa strategi persuasi yang berhasil bergantung pada prinsip seperti otoritas, konsensus sosial, dan liking, yang secara signifikan memengaruhi penerimaan publik terhadap pesan kebijakan. Dalam konteks kebijakan publik, penelitian Chong dan Druckman (2007) menunjukkan bahwa cara sebuah pesan dirumuskan termasuk struktur, narasi, dan konteksnya dapat membentuk preferensi publik melalui proses attitude formation dan opinion change. Dengan demikian, komunikasi kebijakan bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi merupakan proses psikologis yang memanfaatkan dinamika kognitif dan sosial untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Komponen penting lainnya dalam psikologi komunikasi kebijakan adalah *trust-building* dan *risk communication*, terutama ketika kebijakan berkaitan dengan ancaman nirmiliter seperti kesehatan masyarakat, disinformasi, atau keamanan lingkungan. Menurut Tyler (2006), tingkat kepercayaan publik terhadap institusi dipengaruhi oleh persepsi keadilan prosedural dan transparansi, yang kemudian menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan. Dalam bidang komunikasi risiko, Cavello (2010) menekankan bahwa masyarakat cenderung memberikan respons lebih baik terhadap pesan risiko ketika komunikasi dilakukan secara konsisten, empatik, dan berbasis sains. Selain itu, penelitian Slovic (2016) menunjukkan bahwa persepsi risiko dipengaruhi oleh faktor afektif dan pengalaman subjektif, sehingga pesan kebijakan harus mempertimbangkan bagaimana publik menilai ancaman secara emosional maupun rasional. Keseluruhan literatur ini menunjukkan bahwa psikologi komunikasi kebijakan berperan penting dalam membentuk respons kolektif terhadap kebijakan negara di sektor nirmiliter.

## 2.2 Dimensi Ketahanan Nasional di Sektor Nirmiliter dan Peran Masyarakat

Ketahanan nasional non-militer dipahami sebagai kapasitas suatu negara untuk mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan melalui dimensi-dimensi non-kinetik seperti ekonomi, sosial budaya, politik, kesehatan, lingkungan, dan keamanan siber. Dalam dimensi ekonomi, ketahanan ditentukan oleh resiliensi sistem produksi, diversifikasi ekonomi, dan kemampuan menghadapi guncangan global (Briguglio et al., 2009). Sementara itu, dimensi sosial budaya menekankan kohesi sosial, toleransi, dan nilai-nilai kolektif sebagai fondasi menghadapi disrupsi sosial (Putnam, 2007). Ketahanan politik mencakup legitimasi institusi, integritas tata kelola, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Diamond, 2019). Di sisi lain, pandemi global menegaskan pentingnya ketahanan kesehatan sebagai aspek kunci stabilitas nasional, terutama melalui kapasitas respons kesehatan masyarakat (Kruk et al., 2015). Ketahanan lingkungan juga menjadi prioritas,

karena perubahan iklim berpotensi mengganggu keamanan pangan, energi, dan ekosistem (Adger, 2000).

Keamanan siber kini menjadi dimensi strategis ketahanan non-militer, mengingat meningkatnya ancaman digital terhadap infrastruktur vital, layanan publik, dan kepercayaan masyarakat (Kello, 2013). Negara membutuhkan kemampuan deteksi, respons, dan pemulihan dari serangan siber sebagai bagian dari keamanan nasional yang menyeluruh. Pendekatan multidimensi ini sejalan dengan paradigma keamanan modern yang menekankan bahwa ancaman non-tradisional sama pentingnya dengan ancaman militer dalam menjaga stabilitas negara (Buzan & Hansen, 2009). Dengan demikian, ketahanan nasional merupakan konstruksi kompleks yang memerlukan integrasi lintas sektor untuk menciptakan sistem yang adaptif dan responsif terhadap berbagai bentuk risiko.

Peran masyarakat sebagai aktor pusat ketahanan non-militer menjadi semakin menonjol dalam literatur kontemporer. Masyarakat berfungsi sebagai *frontline actors* dalam menghadapi krisis, baik melalui partisipasi sosial, keterlibatan politik, maupun adaptasi budaya yang meningkatkan kapasitas respon kolektif (Aldrich, 2012). Kepercayaan sosial (*social trust*) dan modal sosial (*social capital*) terbukti memperkuat kemampuan komunitas untuk pulih dari krisis, termasuk bencana alam, ketidakstabilan politik, dan disrupsi ekonomi (Nakagawa & Shaw, 2004). Selain itu, masyarakat berperan dalam keamanan siber melalui literasi digital, praktik keamanan individu, dan kontribusi terhadap ekosistem informasi yang sehat (Bada & Sasse, 2015). Dengan demikian, ketahanan nasional bukan sekadar produk kebijakan negara, tetapi hasil interaksi dinamis antara institusi dan kapasitas warga negara sebagai pemangku kepentingan utama dalam menjaga keberlanjutan negara.

### 2.3 Integrasi Psikologi Kebijakan dan Ketahanan Nasional

Pengaruh persepsi publik memainkan peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam konteks ketahanan nasional yang membutuhkan dukungan dan legitimasi masyarakat. Kebijakan publik yang dipersepsi sebagai adil, transparan, dan berbasis bukti terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan dan efektivitas hasil kebijakan (Tyler, 2006). Dalam isu-isu nirmiliter seperti kesehatan, keamanan informasi, atau stabilitas sosial, persepsi risiko masyarakat juga menentukan sejauh mana masyarakat bersedia mengikuti intervensi negara (Van Bavel et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi publik bukan hanya variabel sosial, tetapi merupakan faktor psikologis strategis yang menentukan ketahanan nasional.

Selain persepsi individu, psikologi kolektif seperti *collective efficacy* dan kohesi sosial (*social cohesion*) juga terbukti menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan masyarakat. *Collective efficacy*, yang merujuk pada keyakinan kelompok bahwa mereka mampu mengorganisasi tindakan bersama untuk menghadapi tantangan, secara empiris berkontribusi pada penurunan risiko sosial seperti kekerasan dan krisis komunitas (Sampson, Raudenbush, & Earls, 1997). Sementara itu, kohesi sosial meliputi rasa percaya, solidaritas, dan norma kerja sama mendorong mekanisme ketahanan sosial yang kuat, terutama dalam menghadapi bencana atau ancaman non-tradisional (Aldrich & Meyer, 2015). Ketahanan nasional nirmiliter dengan demikian sangat ditopang oleh kapasitas psikologis kolektif masyarakat, bukan hanya kebijakan struktural semata.

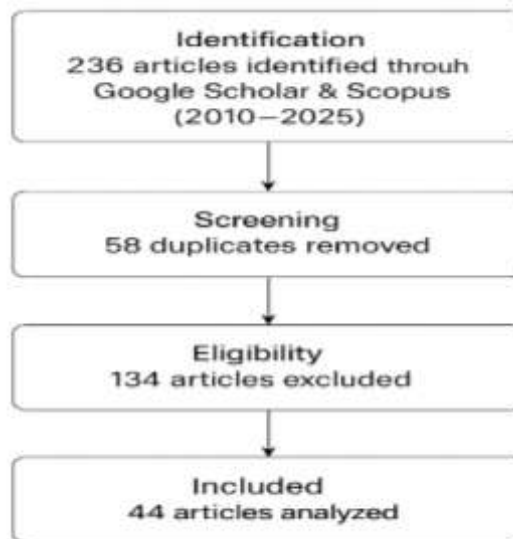
Konsep behavioral governance melengkapi integrasi psikologi kebijakan dan ketahanan nasional melalui pendekatan yang mengoptimalkan pemahaman perilaku manusia dalam tata kelola publik. Pendekatan ini memanfaatkan temuan ekonomi perilaku termasuk *nudging* untuk mendorong masyarakat memilih perilaku yang mendukung stabilitas nasional, seperti kepatuhan protokol kesehatan, kesiapsiagaan bencana, atau keamanan siber (Sunstein, 2014). Studi oleh John et al. (2019) menunjukkan bahwa intervensi berbasis perilaku dapat meningkatkan tingkat partisipasi publik dalam berbagai program pemerintah. Dalam konteks ketahanan nasional, *behavioral governance* membantu pemerintah merancang intervensi yang lebih adaptif terhadap bias kognitif publik, sehingga menciptakan kebijakan nirmiliter yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengeksplorasi peran psikologi kebijakan dalam memperkuat ketahanan nasional di sektor non-militer. Metode ini memungkinkan analisis mendalam terhadap konsep, teori, dan hasil empiris dari literatur akademik dan kebijakan publik terkait psikologi kebijakan serta ketahanan nasional. Pencarian literatur dilakukan pada dua basis data utama, yaitu Google Scholar dan Scopus, dengan rentang waktu publikasi

tahun 2010–2025, guna memastikan keterwakilan hasil penelitian mutakhir dalam bidang behavioral public policy dan ketahanan nirmiliter. Kata kunci yang digunakan meliputi: “*behavioral public policy*”, “*policy psychology*”, “*national resilience non-military*”, dan “*psychological mechanisms policy*.”

Proses seleksi literatur mengikuti pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), yang mencakup empat tahap: identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Dari total 236 artikel yang diperoleh pada tahap awal, 58 artikel dieliminasi karena duplikasi, 134 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria relevansi atau kualitas metodologis, dan 44 artikel akhir dipilih untuk dianalisis secara mendalam. Kriteria inklusi meliputi: Artikel yang terbit di jurnal terindeks Scopus atau bereputasi nasional, Fokus pembahasan pada integrasi psikologi, kebijakan publik, atau ketahanan nasional, Ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia, Memiliki pendekatan empiris, konseptual, atau kebijakan yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, di mana tema-tema utama seperti persepsi publik, kohesi sosial, *collective efficacy*, *behavioral governance*, dan *trust-building* diidentifikasi, dikodekan, dan disintesis untuk membangun kerangka konseptual yang komprehensif.



Gambar 1. Proses Seleksi Literatur Mengikuti Pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA)

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1. Hasil Temuan Utama SLR (Key Findings)

Hasil *Systematic Literature Review* terhadap 44 artikel terpilih menunjukkan bahwa integrasi psikologi kebijakan dalam konteks ketahanan nasional nirmiliter menghasilkan lima temuan utama:

1. Faktor Psikologis sebagai Determinan Ketahanan Nasional  
Variabel seperti persepsi risiko, kepercayaan publik, bias kognitif, dan kohesi sosial berperan langsung dalam menentukan efektivitas kebijakan publik di sektor sosial, ekonomi, kesehatan, siber, pangan, dan lingkungan.
2. Behavioral Insights dan Legitimasi Kebijakan  
Penerapan *nudging*, *framing*, dan *behavioral governance* terbukti meningkatkan kepatuhan publik terhadap kebijakan strategis serta memperkuat legitimasi institusional.
3. Peran Kolektif dan Kohesi Sosial  
Konsep *collective efficacy* dan *social trust* muncul berulang sebagai fondasi ketahanan sosial, memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman non-tradisional dan membangun resiliensi kolektif.
5. Tantangan Implementatif  
Hambatan utama ditemukan pada keterbatasan *behavioral unit* dalam birokrasi, rendahnya data perilaku empiris, serta isu etika terkait transparansi penggunaan intervensi perilaku.

#### 6. Rekomendasi Strategis

Literatur merekomendasikan pembentukan *Behavioral Insights Unit* nasional, integrasi riset perilaku dalam kebijakan publik, serta desain komunikasi risiko berbasis psikologi untuk memperkuat ketahanan nasional nirmiliter secara berkelanjutan.

Temuan-temuan ini menjadi dasar konseptual bagi pembahasan berikutnya yang menjelaskan mekanisme psikologi kebijakan dalam memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor nirmiliter.

#### 4.1.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil dan generalisasi temuan.

##### 1. Keterbatasan Basis Data

Kajian ini hanya menggunakan dua basis data utama, yaitu Google Scholar dan Scopus, yang meskipun mencakup literatur akademik luas, berpotensi mengabaikan artikel dari basis data lain seperti *Web of Science* atau PubMed. Akibatnya, sebagian studi relevan yang tidak terindeks pada dua sumber tersebut mungkin belum tercakup dalam analisis akhir.

##### 2. Potensi Bias Seleksi

Proses seleksi artikel yang didasarkan pada kata kunci dan kriteria inklusi tertentu berisiko menimbulkan bias seleksi (*selection bias*). Meskipun prosedur PRISMA telah diikuti, subjektivitas peneliti dalam menilai relevansi dan kualitas metodologis artikel masih dapat memengaruhi hasil akhir SLR ini.

##### 3. Keterbatasan Rentang Waktu Literatur

Rentang publikasi tahun 2010–2025 dipilih untuk memastikan fokus pada literatur mutakhir, namun keputusan ini membatasi kemungkinan memasukkan sumber klasik atau fundamental yang terbit sebelum 2010 dan tetap relevan terhadap kerangka konseptual psikologi kebijakan serta ketahanan nasional.

##### 4. Keterbatasan Analisis Tematik

Pendekatan analisis tematik memberikan kedalaman interpretatif, tetapi tidak memungkinkan kuantifikasi hubungan antar variabel seperti yang dapat dicapai dengan *meta-analysis*. Dengan demikian, hasil penelitian ini bersifat konseptual dan eksploratif, bukan kausalitas statistik.

Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas basis data, memperpanjang cakupan temporal literatur, serta mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam mengkaji psikologi kebijakan dan ketahanan nasional.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Mekanisme Psikologi Kebijakan dalam Ketahanan Nasional

Penerapan *behavioral insights* dalam kebijakan publik terbukti menjadi mekanisme efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan strategis negara, sehingga memperkuat ketahanan nasional di sektor nirmiliter. Prinsip-prinsip psikologi kebijakan seperti nudging, framing, dan default effects dapat mendorong perilaku publik tanpa paksaan, tetapi melalui pengelolaan konteks keputusan yang lebih adaptif terhadap bias kognitif masyarakat (Thaler & Sunstein, 2008). Dalam konteks ketahanan nasional, pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan, mitigasi bencana, hingga keamanan siber. Studi Van Bavel et al. (2020) menunjukkan bahwa intervensi berbasis ilmu perilaku seperti pesan berbasis norma sosial dan komunikasi risiko yang jelas secara signifikan meningkatkan kepatuhan publik selama pandemi COVID-19, memperkuat ketahanan kesehatan sebagai salah satu elemen utama ketahanan nirmiliter.

*Behavioral governance* memungkinkan pemerintah merancang kebijakan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi persepsi risiko, kepercayaan pada institusi, dan motivasi kepatuhan. Penelitian John et al. (2019) menunjukkan bahwa eksperimen kebijakan berbasis nudge meningkatkan partisipasi warga dalam program pemerintah, yang menjadi prasyarat penting untuk ketahanan sosial dan ketahanan komunitas. Dalam kerangka ketahanan nasional nirmiliter, *behavioral insights* tidak hanya meningkatkan tingkat kepatuhan, tetapi juga memperkuat rasa efikasi kolektif (*collective efficacy*) dan kohesi sosial dua variabel psikologis yang terbukti meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merespons ancaman non-tradisional seperti disinformasi, krisis kesehatan, dan kerentanan digital

(Aldrich & Meyer, 2015). Dengan demikian, integrasi psikologi kebijakan melalui pendekatan perilaku berkontribusi langsung pada ketahanan nasional yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis pada perubahan perilaku masyarakat.

Salah satu mekanisme penting psikologi kebijakan dalam memperkuat ketahanan nasional adalah kemampuannya untuk mengurangi resistensi publik terhadap kebijakan strategis melalui pembangunan kepercayaan (*trust-building*) dan komunikasi risiko yang efektif. Studi empiris menunjukkan bahwa tingkat *trust in government* secara signifikan memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan: misalnya, Shanka (2021) menemukan bahwa kepercayaan publik merupakan prediktor utama perilaku mematuhi protokol kesehatan. Komunikasi kebijakan yang transparan, responsif, dan dirancang dengan memperhatikan persepsi risiko publik dapat meminimalkan reaktansi psikologis (resistensi), karena masyarakat merasa dilibatkan dan dipercaya, bukan diatur secara otoriter.

Menurut laporan *Behavioral Insights Team* mengenai *behavioral government*, penggunaan wawasan perilaku membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih empatik dan realistis, sehingga mampu menurunkan hambatan psikologis terhadap kepatuhan. Dengan cara ini, intervensi kebijakan seperti nudging atau framing pesan kebijakan tidak hanya mendorong perilaku yang diinginkan, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan itu sendiri. Hasilnya, resistensi terhadap kebijakan strategis seperti perubahan regulasi, protokol darurat, atau intervensi keamanan nirmiliter dapat ditekan karena masyarakat merasa kebijakan tersebut adalah hasil dialog dan refleksi bersama, bukan pemaksaan semata.

Mekanisme psikologi kebijakan yang sangat strategis dalam memperkuat ketahanan nasional non-militer selanjutnya adalah pembangunan kepercayaan publik (*trust-building*), yang turut meningkatkan legitimasi institusi pemerintah. Kepercayaan publik berfungsi sebagai fondasi legitimasi kebijakan karena memengaruhi penerimaan, kepatuhan, dan dukungan masyarakat terhadap intervensi pemerintah (OECD, 2017). Dalam konteks kebijakan strategis, pendekatan psikologis seperti komunikasi transparan, keterlibatan partisipatif, dan manajemen narasi dapat memperkuat *perceived legitimacy* pemerintah. Misalnya, penelitian oleh Sastrawan dan Rahmawati (2025) pada kebijakan TAPERA di Indonesia menunjukkan bahwa transparansi informasi dan responsivitas publik melalui kanal komunikasi resmi memainkan peran penting dalam membangun citra legitimasi kebijakan (Sastrawan & Rahmawati, 2025).

Hasil analisis menegaskan bahwa psikologi kebijakan tidak hanya menciptakan kepercayaan sebagai respons pasif, tetapi juga menghidupkan legitimasi melalui relasi dinamis antara negara dan warga. Ketika kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan aspek psikologis seperti perasaan masyarakat bahwa suaranya didengar (*participation*) dan nilai-nilai keadilan procedural maka masyarakat merasa dihargai dan diperhitungkan, yang memperkuat legitimasi institusional (Mardiyanta, 2011). Dengan demikian, mekanisme psikologi kebijakan memperkuat ketahanan nasional dengan cara meningkatkan *governance legitimacy* secara psikososial bukan hanya melalui struktur formal, tetapi lewat pembangunan kepercayaan yang berkelanjutan di antara masyarakat dan pemerintah.

Mekanisme utama psikologi kebijakan dalam memperkuat ketahanan nasional adalah komunikasi risiko yang efektif, yang berfungsi tidak hanya untuk menyampaikan informasi bahaya tetapi juga membangun kepercayaan dan memandu tindakan publik secara rasional. Komunikasi risiko menghubungkan persepsi risiko publik dengan respons kebijakan, karena penyampaian pesan yang transparan, tepat waktu, dan berbasis bukti dapat mengurangi kecemasan dan resistensi masyarakat (Rogers, Amlôt, Rubin, Wessely, & Krieger, 2007). Misalnya, dalam studi terkait pandemi COVID-19, *risk communication* terbukti memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ancaman sehingga meningkatkan perilaku pencegahan, melalui mekanisme persepsi risiko sebagai mediator antara pesan komunikasi dan niat tindakan (Huynh et al., 2020). Hasil analisis menunjukkan bahwa ketika pemerintah mengkomunikasikan risiko secara jujur dan empatik, dengan saluran yang dipercaya masyarakat, maka legitimasi kebijakan nirmiliter seperti kebijakan kesehatan atau mitigasi informasi dapat meningkat, karena publik merasa dilibatkan dan dilindungi. Mekanisme ini memperkuat ketahanan non-militer dengan cara membangun respons kolektif berdasarkan pemahaman bersama atas bahaya dan strategi mitigasi yang disepakati.

#### 4.2.2 Peran Psikologi Kebijakan dalam Berbagai Sektor Nirmiliter

##### A. Ketahanan Sosial dan Budaya

Psikologi kebijakan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan budaya, terutama dalam konteks meningkatnya polarisasi dan konflik identitas. Literatur psikologi sosial menunjukkan bahwa polarisasi dipicu oleh dinamika *ingroup-outgroup* yang membentuk bias sosial dan

meningkatkan konflik antar kelompok (Tajfel & Turner, 1979). Dalam konteks kebijakan publik, kondisi ini dapat menghambat implementasi program nasional karena kelompok masyarakat menolak kebijakan berdasarkan identitas, bukan substansi kebijakan. Sunstein (2019) menegaskan bahwa polarisasi kelompok dapat diperkuat oleh lingkungan informasi dan norma kelompok yang homogen, sehingga intervensi psikologis diperlukan untuk mengurangi eskalasi konflik berbasis identitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan yang mempertimbangkan sensitivitas identitas dan dinamika psikologis kelompok lebih efektif dalam mencegah fragmentasi sosial.

Penguatan kohesi sosial merupakan pilar penting ketahanan nasional non-militer, dan pendekatan psikologis terbukti efektif dalam membangun rasa keterhubungan antarwarga. Bandura (2000) menjelaskan konsep *collective efficacy*, yaitu keyakinan kolektif bahwa suatu komunitas mampu mengatasi tantangan bersama, yang berkorelasi positif dengan stabilitas sosial dan kepatuhan terhadap kebijakan publik. Intervensi psikologi kebijakan seperti deliberasi publik, *community engagement*, dan pesan naratif (*narrative messaging*) dapat memperkuat kohesi sosial dengan menumbuhkan rasa memiliki terhadap tujuan nasional. Studi Putnam (2007) juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan sosial (*social trust*) dan interaksi antarkelompok sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman sosial dan budaya, termasuk konflik horizontal maupun tekanan eksternal. Pembahasan literatur memperlihatkan bahwa kebijakan yang memfasilitasi interaksi lintas kelompok akan meningkatkan resiliensi sosial secara signifikan.

Aspek lain yang semakin krusial adalah kemampuan pemerintah menghadapi propaganda dan disinformasi yang dapat melemahkan ketahanan sosial. Research oleh Lewandowsky, Ecker, dan Cook (2017) menunjukkan bahwa disinformasi bekerja melalui mekanisme psikologis terutama *confirmation bias* dan *motivated reasoning* yang menyebabkan individu mempercayai informasi palsu yang sejalan dengan identitas kelompok. Oleh karena itu, strategi psikologi kebijakan seperti *prebunking* dan *inoculation theory* efektif digunakan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap manipulasi informasi (van der Linden, Leiserowitz, Rosenthal, & Maibach, 2017). Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi komunikasi berbasis psikologi yang proaktif lebih efektif dibandingkan sekadar koreksi fakta (*debunking*), terutama dalam konteks ancaman sosial-budaya yang cepat menyebar melalui media digital. Dengan demikian, integrasi mekanisme psikologi kebijakan dalam menghadapi disinformasi menjadi elemen penting ketahanan nasional nirmiliter.

### **B. Ketahanan Ekonomi**

Psikologi kebijakan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan ekonomi dengan menjelaskan bagaimana perilaku masyarakat memengaruhi stabilitas keuangan publik. Dalam konteks ini, *behavioral economics* menunjukkan bahwa keputusan ekonomi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh bias kognitif dan heuristik, sehingga tidak selalu mencerminkan rasionalitas sempurna sebagaimana diasumsikan dalam teori ekonomi klasik (Kahneman, 2011). Pemahaman terhadap perilaku ini membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih adaptif, misalnya melalui nudge untuk mendorong perilaku menabung, pengelolaan konsumsi, dan kepatuhan pajak, yang secara empiris terbukti dapat memperbaiki stabilitas keuangan publik (Thaler & Sunstein, 2008). Dengan demikian, stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh indikator makroekonomi, tetapi juga oleh mekanisme psikologis yang membentuk perilaku keuangan masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap stabilitas ekonomi terbukti berpengaruh langsung terhadap keputusan ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan preferensi risiko. Akerlof dan Shiller (2009) menekankan bahwa narasi ekonomi dan persepsi publik terhadap keamanan ekonomi dapat menciptakan dinamika psikologis yang memperkuat atau melemahkan ketahanan ekonomi nasional. Ketika masyarakat memiliki persepsi positif mengenai stabilitas ekonomi, mereka lebih cenderung melakukan keputusan finansial yang konstruktif seperti meningkatkan belanja dan investasi, sedangkan persepsi negatif dapat memicu panic behavior dan kontraksi ekonomi. Bukti empiris menunjukkan bahwa komunikasi ekonomi pemerintah yang transparan dan konsisten dapat memperkuat kepercayaan publik dan mengurangi volatilitas ekonomi selama periode ketidakpastian (Shiller, 2017). Temuan ini menegaskan bahwa psikologi kebijakan memainkan peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi melalui pembentukan persepsi publik yang stabil dan berbasis informasi.

### **C. Ketahanan Kesehatan**

Psikologi kebijakan berperan penting dalam memperkuat ketahanan kesehatan melalui penerapan *behavioral insights* dalam penyusunan kebijakan kesehatan publik, terutama dalam situasi krisis seperti

pandemi. Studi pada masa COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan yang mempertimbangkan faktor psikologis, seperti persepsi risiko, trust terhadap otoritas kesehatan, dan desain pesan kesehatan, lebih efektif dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (Van Bavel et al., 2020). Penerapan *nudging*, seperti penyederhanaan informasi, penggunaan norma sosial, dan desain pilihan (*choice architecture*), terbukti meningkatkan perilaku protektif termasuk penggunaan masker, vaksinasi, dan praktik hygiene (Lunn et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa integrasi psikologi kebijakan dalam kebijakan kesehatan tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional di sektor nirmiliter melalui optimalisasi respons masyarakat terhadap ancaman kesehatan.

Faktor psikologis memainkan peran sentral dalam membentuk perilaku kesehatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada resiliensi sistem kesehatan nasional. Persepsi risiko, *self-efficacy*, dan motivasi kesehatan telah terbukti memengaruhi keputusan masyarakat dalam mengambil tindakan preventif, seperti vaksinasi dan pembatasan mobilitas (Dryhurst et al., 2020). Ketika masyarakat memiliki persepsi risiko yang akurat dan kepercayaan yang kuat terhadap pemerintah, kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan meningkat, sehingga mengurangi beban sistem kesehatan dan mempercepat stabilisasi kondisi nasional. Temuan ini menegaskan bahwa ketahanan kesehatan tidak hanya bersifat struktural atau medis, tetapi juga psikologis dan bahwa pemahaman mendalam terhadap psikologi publik merupakan syarat utama dalam merancang kebijakan kesehatan yang efektif dan adaptif.

#### **D. Ketahanan Siber Informasi**

Psikologi kebijakan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan siber dan informasi, terutama karena ancaman kontemporer seperti hoaks, disinformasi, dan *cyber influence* sangat bergantung pada manipulasi persepsi dan emosi publik. Studi oleh Lewandowsky, Ecker, dan Cook (2017) menunjukkan bahwa hoaks dan misinformasi bekerja melalui mekanisme psikologis seperti *confirmation bias* dan *motivated reasoning*, yang membuat masyarakat lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan identitas dan keyakinan mereka. Kerentanan psikologis ini dapat dimanfaatkan oleh aktor domestik maupun asing untuk menciptakan polarisasi sosial, mengurangi kepercayaan pada pemerintah, dan melemahkan kohesi nasional. Oleh karena itu, kebijakan yang menggabungkan psikologi kognitif dan sosial menjadi penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap manipulasi informasi, misalnya melalui pendekatan *prebunking* dan *inoculation theory*, yang terbukti efektif mengurangi penerimaan publik terhadap misinformasi (van der Linden et al., 2017).

Literasi digital dapat dipahami sebagai bentuk intervensi psikologis struktural yang bertujuan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi, memproses, dan merespons informasi secara kritis. Literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan kognitif dan metakognitif untuk mengidentifikasi bias, sumber informasi, dan pola manipulasi digital (Guess, Nagler, & Tucker, 2019). Studi empiris menunjukkan bahwa program literasi digital berbasis psikologi dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap misinformasi daring, termasuk peningkatan kemampuan fact-checking dan pengurangan kecenderungan berbagi hoaks (Jones-Jang, Mortensen, & Liu, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa integrasi psikologi kebijakan dalam sektor siber dan informasi tidak hanya memperkuat respons individual, tetapi juga menciptakan fondasi ketahanan kolektif yang penting bagi stabilitas nasional di era digital.

#### **E. Ketahanan Pangan dan Lingkungan**

Psikologi kebijakan memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan lingkungan dengan memahami bagaimana persepsi risiko masyarakat memengaruhi dukungan dan kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko lingkungan sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti nilai personal, identitas sosial, serta tingkat literasi ilmiah masyarakat (van der Linden, 2015). Misalnya, masyarakat yang memiliki persepsi tinggi terhadap risiko perubahan iklim cenderung lebih mendukung kebijakan adaptasi dan mitigasi, termasuk transisi energi dan regulasi pangan berkelanjutan. Dalam konteks ketahanan pangan, persepsi risiko terhadap ancaman ekologis seperti degradasi lahan, krisis air, dan ketidakpastian iklim berperan dalam membentuk perilaku konsumsi dan penerimaan terhadap inovasi pangan, seperti diversifikasi pangan lokal dan teknologi pertanian cerdas iklim. Temuan ini menegaskan bahwa variabel psikologis merupakan determinan kunci dalam keberhasilan kebijakan pangan dan lingkungan pada level nasional.

Kebijakan keberlanjutan dan perubahan iklim semakin bergantung pada behavioral insights untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Studi oleh Clayton et al. (2015) menemukan bahwa faktor-faktor

psikologis seperti environmental identity, norma sosial, dan motivasi intrinsik berpengaruh signifikan terhadap perilaku pro-lingkungan, termasuk pengurangan limbah, konservasi energi, dan partisipasi dalam program keberlanjutan. Dalam konteks ketahanan nasional, intervensi berbasis psikologi seperti *green nudges*, *framing* pesan lingkungan, dan peningkatan kesadaran risiko dapat mendorong perilaku kolektif yang mendukung ketahanan ekologi dan keberlanjutan pangan. Kebijakan perubahan iklim yang mengintegrasikan aspek psikologis telah terbukti lebih efektif dalam membangun long-term ecological resilience, karena mampu mengubah pola pikir masyarakat dari orientasi konsumtif ke orientasi berkelanjutan (Nielsen et al., 2021). Dengan demikian, psikologi kebijakan tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan dan ekologi Indonesia.

#### 4.2.3 Tantangan Implementasi Psikologi Kebijakan di Indonesia

Salah satu tantangan utama dalam penerapan psikologi kebijakan di Indonesia adalah rendahnya integrasi “behavioral unit” di kementerian dan lembaga pemerintah. Meskipun ada minat untuk menerapkan *nudge* dan *behavioral insights*, kapasitas institusional masih terbatas. Sebagai contoh, kajian menyebutkan bahwa birokrasi Indonesia cenderung kaku dan hierarkis, sehingga resistensi terhadap inovasi berbasis perilaku menjadi hambatan signifikan (Anggara, 2024). Tanpa unit terpusat yang secara khusus bertanggung jawab atas integrasi ilmu perilaku, intervensi psikologi kebijakan sulit untuk diproduksi secara sistematis dan berkelanjutan, melainkan hanya sebagai proyek temporer atau eksperimental.

Kedua, ada kurangnya data perilaku masyarakat berbasis bukti (*evidence*) yang dapat menjadi dasar intervensi kebijakan. Untuk menerapkan *behavioral public policy* secara efektif, pembuat kebijakan membutuhkan data empiris tentang bagaimana masyarakat benar-benar berpikir, merasa, dan bertindak dalam konteks lokal. Namun, studi empiris di Indonesia masih relatif terbatas. Tanpa data perilaku yang kuat, intervensi seperti *nudge* bisa salah sasaran atau kurang efektif bahkan dalam penelitian lokal penerapan *social nudge* pada pegawai negeri, hanya segmen kecil yang telah diuji (Putra, Sampe, & Simandjorang, 2023). Keterbatasan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pengembangan survei perilaku dan eksperimen terarah di level nasional.

Ketiga, hambatan budaya dan birokrasi juga menjadi rintangan signifikan. Budaya birokrasi yang formalistik dan nilai-nilai hierarchical menyebabkan reformasi perilaku sulit dijalankan, karena struktur organisasi cenderung memperlambat adopsi pendekatan baru (Pratama, 2025). Selain itu, norma sosial dan budaya lokal dapat memengaruhi bagaimana masyarakat merespons intervensi perilaku; nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan rasa hormat terhadap otoritas bisa mengubah efektivitas *nudge* jika tidak dirancang dengan sensitif terhadap konteks budaya (Penelitian evaluasi budaya birokrasi memperlihatkan ini sebagai pola kesulitan dalam implementasi reformasi). Karena itu, merancang intervensi psikologi kebijakan di Indonesia harus memperhatikan dimensi budaya agar tidak menimbulkan resistensi atau ketidakrelevanan.

Keempat, ada isu etika dalam penggunaan *nudge* dan manipulasi persepsi publik. Teori paternalistik perilaku (*libertarian paternalism*) memang menawarkan cara halus untuk mengarahkan perilaku warga, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan otonomi individu. Kritik atas penerapan behavioral insights menyoroti bahwa intervensi semacam *nudge* dapat „bekerja dalam gelap” tanpa disadari oleh publik, dan ini menantang legitimasi demokratis (Kuehnhanss, 2018). Di Indonesia, keprihatinan serupa muncul karena potensi penyalahgunaan intervensi psikologis untuk tujuan politis atau propaganda, yang dapat merusak kepercayaan publik (Gunawan, 2022). Selain itu, dengan kemajuan teknologi seperti AI, etika data dan desain *nudge* menjadi lebih kompleks, karena potensi manipulasi persepsi yang lebih canggih dapat mengikis kepercayaan jangka panjang (Link & Society, 2025).

#### 4.2.4 Implikasi Kebijakan

Peningkatan ketahanan nasional di sektor nirmiliter membutuhkan pembentukan *Behavioral Insights Unit* (BIU) nasional yang menjadi pusat koordinasi penerapan psikologi kebijakan lintas kementerian. Banyak negara yang mampu meningkatkan efektivitas kebijakan publik setelah membentuk unit ini, seperti *Behavioural Insights Team* di Inggris yang terbukti meningkatkan kepatuhan pajak dan efektivitas program layanan publik (Hallsworth et al., 2017). Dalam konteks Indonesia, BIU nasional akan memperkuat pendekatan berbasis perilaku pada isu-isu strategis non-militer seperti ketahanan sosial, kesehatan, dan informasi. Keberadaan unit ini juga penting untuk menyusun eksperimen terkontrol (*policy experimentation*) yang menjadi fondasi dari *evidence-based behavioral public policy* (Oliver, 2017).

Peningkatan riset psikologi kebijakan sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan nirmiliter yang kompleks dan multidimensional. Studi-studi perilaku masyarakat Indonesia masih cenderung sporadis dan

belum terintegrasi dalam siklus kebijakan nasional. Padahal, penelitian empiris mengenai bias kognitif, persepsi risiko, dan pola pengambilan keputusan memiliki dampak signifikan dalam desain intervensi kebijakan (Sunstein, 2014). Mengingat banyak kebijakan publik gagal karena tidak mempertimbangkan faktor psikologis, perluasan riset ini harus dilakukan melalui kolaborasi universitas pemerintah lembaga riset independen guna menghasilkan basis data perilaku nasional yang dapat dimanfaatkan untuk ketahanan sosial, ekonomi, siber, dan kesehatan.

Implikasi berikutnya adalah kebutuhan penguatan komunikasi strategis pemerintah yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi sosial, framing, dan manajemen persepsi. Dalam situasi krisis, strategi komunikasi yang tepat terbukti memengaruhi tingkat kepatuhan publik, meminimalkan ketidakpastian, dan memperkuat legitimasi institusi (Liu, Fraustino, & Jin, 2016). Di era banjir informasi, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan *strategic communication framework* yang mampu merespons disinformasi, meningkatkan literasi digital, serta menjaga stabilitas psikologis publik. Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa kerangka komunikasi yang berbasis psikologi publik secara signifikan meningkatkan efektivitas kebijakan krisis di berbagai negara (Jin, 2022).

Terakhir, penerapan psikologi kebijakan perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk berbagai sektor nirmiliter, seperti ketahanan pangan, keamanan siber, perubahan iklim, dan kesehatan. Integrasi ini penting karena RAN merupakan pedoman operasional lintas instansi, sehingga pendekatan psikologi kebijakan dapat menjadi standar dalam formulasi intervensi publik.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menegaskan bahwa psikologi kebijakan merupakan fondasi strategis dalam memperkuat ketahanan nasional di sektor nirmiliter, karena mampu menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan respons perilaku masyarakat. Integrasi prinsip-prinsip psikologi mulai dari persepsi risiko, bias kognitif, kohesi sosial, *collective efficacy*, hingga *trust-building* telah terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan di bidang sosial budaya, ekonomi, kesehatan, siber, pangan, dan lingkungan. Temuan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa pendekatan *behavioral insights* dan *behavioral governance* memungkinkan pemerintah merancang intervensi yang lebih adaptif, *human-centered*, dan berbasis bukti, sehingga meningkatkan kepatuhan publik, mengurangi resistensi, dan memperkuat legitimasi institusional. Selain itu, mekanisme psikologi kebijakan juga memperkuat kapasitas masyarakat sebagai aktor utama ketahanan nasional melalui penguatan literasi digital, pemahaman risiko, partisipasi sosial, dan perilaku pro-kolektif. Dengan demikian, psikologi kebijakan bukan hanya pelengkap dalam proses kebijakan, tetapi merupakan elemen esensial untuk membangun ketahanan nirmiliter Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tengah kompleksitas ancaman kontemporer.

### Rekomendasi

1. Pemerintah Indonesia disarankan untuk membangun institusi *Behavioral Insights Unit* (BIU) nasional yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga, sebagai pusat pengembangan dan penerapan psikologi kebijakan. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa unit semacam ini mampu meningkatkan efektivitas intervensi publik dengan menerapkan *behavioral insights* dalam perumusan kebijakan, desain program, dan evaluasi berbasis bukti (Hallsworth et al., 2017). Di Indonesia, keberadaan BIU nasional dapat membantu menyusun strategi intervensi yang kontekstual, baik dalam sektor kesehatan, sosial budaya, ekonomi, maupun siber, sehingga memperkuat ketahanan nirmiliter secara holistik.
2. Perlu adanya penguatan riset dan pemetaan perilaku masyarakat berbasis *evidence* untuk mendukung kebijakan yang efektif dan adaptif. Studi perilaku lokal yang sistematis dapat mengidentifikasi bias kognitif, persepsi risiko, dan faktor sosial-psikologis yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan nasional (Sunstein, 2014). Rekomendasi ini mencakup peningkatan kolaborasi antara akademisi, lembaga riset independen, dan pemerintah untuk membangun database perilaku nasional yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kebijakan, termasuk dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) di sektor nirmiliter. Dengan data empiris yang valid, intervensi berbasis psikologi dapat dipersonalisasi dan lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan.
3. Pemerintah perlu mengintegrasikan pendekatan psikologi kebijakan dalam komunikasi publik dan perumusan kebijakan strategis, terutama terkait ketahanan siber, pangan, lingkungan, dan kesehatan. Penerapan *behavioral governance* dalam RAN dan kebijakan sektoral dapat memastikan intervensi

psikologis bersifat etis dan demokratis, sambil meminimalkan risiko manipulasi persepsi publik. Integrasi ini menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan nasional di era kompleksitas nirmiliter, di mana masyarakat merupakan aktor pusat dalam keberhasilan kebijakan.

### Bibliografi

- Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347–364. <https://doi.org/10.1191/030913200701540465>
- Akerlof, G. A., & Shiller, R. J. (2009). *Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism*. Princeton University Press.
- Aldrich, D. P. (2012). *Building resilience: Social capital in post-disaster recovery*. University of Chicago Press.
- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269.
- Anggara, S. (2024). Public Policy Reform in Indonesia: Navigating Bureaucratic Culture in the Age of Disruption. *TEC Empresarial*. <https://doi.org/10.1229/tecempresarialjournal.v20i2.637>
- Aurilia, D., Putra, Z. H., & Hermita, N. (2025). Strategi pengumpulan data kualitatif dalam penelitian implementasi kebijakan pendidikan dengan metode systematic literature review (SLR). *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(02), 244–254. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i02.6903>
- Bada, A., & Sasse, M. A. (2015). Cyber security awareness campaigns: Why do they fail to change behaviour? *International Conference on Cyber Security for Sustainable Society*.
- Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. *Current Directions in Psychological Science*, 9(3), 75–78. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.00064>
- Bawden, D., & Robinson, L. (2009). The dark side of information: Overload, anxiety and other paradoxes and pathologies. *Journal of Information Science*, 35(2), 180–191. <https://doi.org/10.1177/0165551508095781Bawd>
- Bonanno, G. A., Brewin, C. R., Kaniasty, K., & La Greca, A. M. (2010). Weighing the costs of disaster: Consequences, risks, and resilience in individuals, families, and communities. *Psychological Science in the Public Interest*, 11(1), 1–49. <https://doi.org/10.1177/1529100610387086>
- Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: Concepts and measurements. *Oxford Development Studies*, 37(3), 229–247.
- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The evolution of international security studies*. Cambridge University Press.
- Chong, D., & Druckman, J. N. (2007). Framing theory. *Annual Review of Political Science*, 10, 103–126. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054>
- Cialdini, R. B. (2007). *Influence: The psychology of persuasion* (Rev. ed.). Harper Business.
- Clayton, S., Devine-Wright, P., Stern, P. C., Whitmarsh, L., Carrico, A., Steg, L., ... & Bonnes, M. (2015). Psychological research and global climate change. *Nature Climate Change*, 5(7), 640–646. <https://doi.org/10.1038/nclimate2622>
- Covello, V. T. (2010). Strategies for effective risk communication. *Journal of Risk Research*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/13669870903123147>
- Diamond, L. (2019). *Ill winds: Saving democracy from Russian rage, Chinese ambition, and American complacency*. Penguin Press.
- Dryhurst, S., Schneider, C. R., Kerr, J., Freeman, A. L., Recchia, G., van der Bles, A. M., ... van der Linden, S. (2020). Risk perceptions of COVID-19 around the world. *Journal of Risk Research*, 23(7–8), 994–1006. <https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193>
- Fjäder, C. (2014). The nation-state, national security and resilience in the age of globalisation. *Resilience*, 2(2), 114–129. <https://doi.org/10.1080/21693293.2014.914771>
- Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J. (2019). Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook. *Science Advances*, 5(1), eaau4586. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4586>
- Gunawan, E. N. (2022). Assessing the potential of nudge as a tool for public policy. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2). <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.3150>
- Haldane, V., Ong, S. E., Chuah, F. L., & Legido-Quigley, H. (2021). Health systems resilience in managing the COVID-19 pandemic: lessons from 28 countries. *Nature Medicine*.

- <https://doi.org/10.1038/s41591-021-01381-y>
- Hallsworth, M., Snijders, V., Burd, H., Prestt, J., Judah, G., Abdelrahman, M., & Halpern, D. (2017). Applying behavioral insights: Simple ways to improve health outcomes. *Journal of Health Communication*, 22(6), 1–8. <https://doi.org/10.1080/10810730.2017.1304470>
- Han, & Society. (2025). AI-enhanced nudging in public policy: why to worry and how to respond. *Mind & Society*. <https://doi.org/10.1007/s11299-025-00322-3>
- Huynh, T. L. D., Tran, T. N., Pham, L., & Pham, H. (2020). The effect of risk communication on preventive and protective behaviours during the COVID-19 outbreak: mediating role of risk perception. *BMC Public Health*, 20, Article (1584). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-10125-5>
- Jin, Y. (2022). Advancing crisis communication effectiveness: Integrating strategic communication and behavioral insights. *Public Relations Review*, 48(4), 1–10.
- John, P., Smith, G., Stoker, G., Geddes, M., & Jones, W. (2019). *Nudge, nudge, think, think: Experimenting with ways to change civic behaviour*. Manchester University Press.
- Jones, B. D. (1999). Bounded rationality. *Annual Review of Political Science*, 2(1), 297–321. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.297>
- Jones-Jang, S. M., Mortensen, T., & Liu, J. (2021). Does media literacy help identification of fake news? Information literacy helps, but other literacies don't. *American Behavioral Scientist*, 65(2), 371–388. <https://doi.org/10.1177/0002764219869406>
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus & Giroux.
- Kello, L. (2013). The meaning of the cyber revolution: Perils to theory and statecraft. *International Security*, 38(2), 7–40.
- Kruk, M. E., Myers, M., Varpilah, S. T., & Dahn, B. T. (2015). What is a resilient health system? Lessons from Ebola. *The Lancet*, 385(9980), 1910–1912.
- Kuehnhan, C. R. (2018). The challenges of behavioural insights for effective policy design. *Policy & Society*, 38(1), 14–40. <https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1511188>
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the “post-truth” era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>
- Liu, B. F., Fraustino, J. D., & Jin, Y. (2016). How audiences respond to crisis communication: The role of psychological distance and crisis response strategies. *Public Relations Review*, 42(2), 1–13.
- Lunn, P. D., Timmons, S., Belton, C. A., Barjaková, M., Julienne, H., & Lavin, C. (2020). Motivating social distancing during the COVID-19 pandemic: An online experiment. *Social Science & Medicine*, 265, 113478. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113478>
- Mardiyanta, A. (2011). Restore Public Trust Through Deliberative Public Policy. *JBB*, Vol. 20, Iss. 1.
- Nakagawa, Y., & Shaw, R. (2004). Social capital: A missing link to disaster recovery. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, 22(1), 5–34.
- Nielsen, K. S., Clayton, S., Stern, P. C., Dietz, T., Capstick, S., & Whitmarsh, L. (2021). How psychology can help limit climate change. *American Psychologist*, 76(1), 130–144. <https://doi.org/10.1037/amp0000624>
- OECD. (2017). *Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust*. OECD Publishing.
- Oliver, A. (2017). *Behavioural public policy*. Cambridge University Press.
- Pratama, A. B. (2025). Bureaucracy Reform Deficit in Indonesia: A Cultural Theory Perspective. *Journal of Public Administration and Governance*. <https://doi.org/10.1155/abcd>
- Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century. *Scandinavian Political Studies*, 30(2), 137–174. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x>
- Putra, A. D., Sampe, V. L., & Simandjorang, B. M. T. V. (2023). Can social nudge reduce civil servants' tardiness behavior?. *Jurnal Bina Praja*, 15. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.373>
- Putra, R. Z. P., Gusnar, I., Solihin, D., Tantri, S., Andrea, H. P., Trismawan, D., & Santoso, S. (2024). Reactualization of national resilience: A historical and conceptual study. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(1), 65–80. <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i1.558>
- Rogers, M. B., Amlôt, R., Rubin, G. J., Wessely, S., & Krieger, K. (2007). Mediating the social and psychological impacts of terrorist attacks: The role of risk perception and risk communication.

- International Review of Psychiatry, 19(3), 279–288. <https://doi.org/10.1080/09540260701349373>
- Roosevelt, M., Raile, E. D., & Anderson, J. R. (2023). Resilience in food systems: Concepts and measurement options in an expanding research agenda. *Agronomy*, 13(2), 444. <https://doi.org/10.3390/agronomy13020444>
- Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. *Science*, 277(5328), 918–924.
- Sastrawan, A., & Rahmawati, D. E. (2025). Building Public Trust Through Government Communication Strategies: A Case Study Of Tapera Policies In Indonesia. *Jurnal Trias Politika*.
- Shafir, E. (Ed.). (2013). *The behavioral foundations of public policy*. Princeton University Press.
- Shiller, R. J. (2017). Narrative Economics. American Economic Association Presidential Address. *American Economic Review*, 107(4), 967–1004. <https://doi.org/10.1257/aer.107.4.967>
- Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–118. <https://doi.org/10.2307/1884852>
- Simon, H. A. (1990). Invariants of human behavior. *Annual Review of Psychology*, 41, 1–19. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.41.020190.000245>
- Slovic, P. (2016). Understanding perceived risk: The psychometric paradigm. *Risk Analysis*, 36(4), 734–742. <https://doi.org/10.1111/risa.12321>
- Sunstein, C. R. (2014). *Why nudge? The politics of libertarian paternalism*. Yale University Press.
- Sunstein, C. R. (2019). *Conformity: The power of social influences*. NYU Press.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131. <https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124>
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 211(4481), 453–458. <https://doi.org/10.1126/science.7455683>
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.
- Tzavara, V. (2023). Tracing the evolution of cyber resilience: A historical and conceptual review. *International Journal of Information Security*. <https://doi.org/10.1007/s10207-023-00811-x>
- Van Bavel, J. J., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., ... Willer, R. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. *Nature Human Behaviour*, 4(5), 460–471. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z>
- Van der Linden, S. (2015). The social-psychological determinants of climate change risk perceptions: A comprehensive review. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 14, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.02.003>
- Van der Linden, S., Leiserowitz, A., Rosenthal, S., & Maibach, E. (2017). Inoculating the public against misinformation about climate change. *Global Challenges*, 1(2), 1600008. <https://doi.org/10.1002/gch2.201600008>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe Report.